



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PERTEMUAN WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA
DENGAN
KONSTITUEN PROVINSI MALUKU UTARA**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Pertemuan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Resto Royal, Kelurahan Santiong Kota Ternate
Provinsi Maluku Utara
- Acara : Gus Muhaimin Mendegar Konstituen Provinsi Maluku Utara
Ketua : Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI, Wakil Ketua DPR
RI/Korkesra
- Sekretaris Rapat : Susantomo S.I.P M.AP.
Hadir : **1. Pimpinan**
- Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI
2. Narasumber
- Juanda A. Ode Iba
- Armin Saomole
3. Peserta Offline
- Jasri Usman (Wakil Walikota Ternate)
- Zulfiah
- Ustadz Jamrud
- Sholahuddin
- Salim
- Idris R.H.I Muhammad
- Riswan Hi. Kadam
4. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Watua DPR RI/Korkesra
5. Staff

I. PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
3. Bahwa Anggota Dewan adalah pejabat *elected* sebagai pemegang amanah suara rakyat, wajib melakukan agregasi dan artikulasi terhadap kehendak dan aspirasi rakyat.
4. Bahwa Anggota DPR RI wajib memperjuangkan program pembangunan untuk daerah pemilihan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI dengan Masyarakat Provinsi Maluku Utara dilakukan secara Hybrid (Virtual dan offline) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Maluku Utara mulai dari praktisi kesehatan, Pendidikan, pelaku UMKM, pegiat literasi desa, kepala desa serta tokoh masyarakat lainnya.

Tanggapan Masyarakat

Kelompok disabilitas Maluku Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Mereka menyampaikan bahwa meski sudah lulus Pendidikan keterampilan khusus, namun rata-rata perusahaan tidak mau menerima kelompok disabilitas sebagai karyawan.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Zulfiah, perwakilan kelompok disabilitas Maluku Utara. Kami sudah lulus sekolah atau sekolah keterampilan, tidak ada yang mau terima kami untuk bekerja. Alasannya kami adalah penyandang disabilitas.

Persoalan lain yang dihadapi para penyandang disabilitas di Maluku Utara adalah soal kesehatan, belum adanya fasilitas Pendidikan khusus untuk para penyandang disabilitas atau sekolah inklusi, serta tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan kebijakan. Kami belum dilibatkan dalam mengambil kebijakan, padahal kami mampu.

Selain dari kelompok disabilitas, dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra juga mendapatkan curhatan dari perwakilan mubaligh yang disampaikan oleh Ustadz Jamrud. Dia mengeluhkan belum adanya perhatian kesejahteraan bagi para imam masjid. Para imam masjid membutuhkan kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan para imam ini bisa ditingkatkan.

Sementara perwakilan dari Dewan Adat setempat, Sholahuddin, menyampaikan persoalan akses pendidikan di musim pandemi. Selain itu, dia menyebutkan bahwa di Maluku Utara ada empat kesultanan, yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Banyak persoalan sosial dapat

dilaksanakan dalam pendekatan adat. Kami harap pemerintah pusat memberikan perhatian sehingga jangan terkesan Pemda berjalan sendiri, tak berbarengan dengan kesultanan atau tokoh adat. Banyak persoalan yang butuh bantuan tokoh adat.

Tanggapan A. Muhaimin Iskandar

Menanggapi berbagai keluhan masyarakat Maluku Utara, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra menyatakan siap memperjuangkan hak-hak masyarakat disabilitas. Selama ini sudah ada UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bila selama ini realisasi di lapangan belum berjalan dengan baik maka pihaknya akan mendorong dan mengingatkan para pemegang kebijakan untuk bisa menjalankan UU dengan baik. Kita dorong mulai Presiden hingga kepala daerah, undang-undang ini banyak dilupakan oleh semua orang. Saatnya kita angkat lagi supaya bisa dilaksanakan dengan baik.

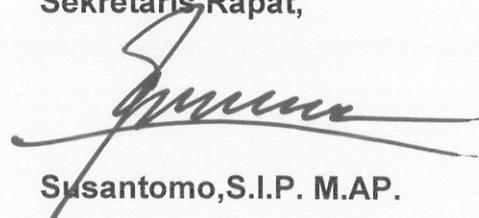
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra ini juga siap untuk mengupayakan kesejahteraan bagi para imam, termasuk persoalan pendidikan yang selama masa pandemi ini belum berjalan baik. Soal pendidikan memang sejak pandemi ini kacau balau. Saya beberapa kali memanggil Mendikbud untuk memberikan perhatian khusus karena tidak efektifnya pendidikan daring. Sampai detik ini ada dua keputusan, Pemda dipersilakan mengambil pilihan daring atau tatap muka dengan prokes ketat. Kedua APBN didorong untuk memfasilitasi carut marut atau kekurangan fasilitas atau sarpras bagi pendidikan di era pandemi ini.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra juga setuju bahwa kekuatan adat masyarakat dengan kultur khasnya harus diberikan ruang. APBN juga harus beri ruang kesempatan tumbuh berkembangnya masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlu ada sinergi potensi adat dan pemerintahan.

III. PENUTUP

Pertemuan ditutup Pukul 14.15 WIB

**A.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,**



Susantomo, S.I.P. M.AP.